

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PROGRAM DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN
REMAJA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



INDRA LESMANA
NPM. 157310635

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Indra Lesmana
Npm : 157310635
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Skripsi : Evaluasi Program Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan
Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah penulisan Skripsi ini telah disusun sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu semoga dapat di setujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru ,23 Februari 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua



Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Andriyus, S.Sos.,M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1720/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor. 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 173/UIR/KPTS/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Indra Lesmana
N P M : 157310635
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis.**

Struktur Tim :

1. Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Nina Yuslimi, S.IP., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----


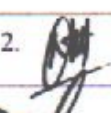
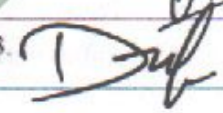
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1729/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 09 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis, tanggal, 10 Desember 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Indra Lesmana
NPM : 157310635
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Di Kabupaten Bengkalis.**

Nilai Ujian : Angka : " 76,2 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Anggota	3. 

Pekanbaru, 10 Desember 2020



Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I/Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Indra Lesmana
Npm : 157310635
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis

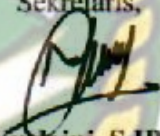
Naskah Skripsi ini secara keseluruhan Dinilai Relatif telah memenuhi Ketentuan- Ketentuan metode penelitian ilmiah, Oleh Karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana

Pekanbaru, 23 Februari 2021

Ketua,

Sekretaris,


Andriyus, S.Sos., M.Si


Nina Yustaini, S.IP, M.Si

Anggota


Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP

Mengetahui

Wakil Dekan I


Indra Satri, S.Sos, M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Indra Lesmana
Npm : 157310635
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis

Naskah Skripsi ini benar-benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan TIM Penguji dan dinilai telah memenuhi Persyaratan Administrasi dan Akademis. Oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 23 Februari 2021

An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,


Andriyus, S.Sos., M.Si


Nina Yuslimi, S.IP, M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Indra Salri, S.Sos, M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tidak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmad dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Evaluasi Program Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Di Kabupaten Bengkalis”. Ini penulis tulis dengan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan Skripsi.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman ilmu serta pengalaman pribadi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasanya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor UIR yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran beserta kritik sedari sedari awal pemulaan pengajuan judul Skripsi ini sehingga sampai pada usulan penelitian yang layak diseminarkan.
4. Bapak Andriyus,S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan menyediakan waktu dan membagi serta menularkan

pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi penulis layak untuk ujian.

5. Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai idola dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moril maupun materil.
6. Untuk teman teman saya yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu saya selama perkuliahan.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian Skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuangan semoga kita sama-sama menemukan masa depan yang sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan. Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 23 Oktober 2020

Penulis

Indra Lesmana

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
SURAT PERNYATAAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Pemerintah.....	12
2. Konsep Pemerintahan.....	14
3. Konsep Kebijakan Publik.....	15
4. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	18
5. Konsep Pemberdayaan.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Pikir.....	25
D. Konsep Operasional.....	27
E. Operasionalisasi Variabel.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Informan dan Key Informan	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	35
G. Jadwal Penelitian	36
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	37

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis	39
1. Keadaan Geografis Kabupaten Bengkalis	39
2. Keadaan Penduduk Kabupaten Bengkalis	41
B. Profil Kecamatan Bantan	42
C. Deskripsi Umum Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	44
1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	44
2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	45
3. Struktur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	46

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas informan	49
1. Jenis Kelamin	49
2. Pendidikan.....	50
3. Umur	51
B. Hasil dan Pembahasan	52
1. Tepat Kebijakan	54
a. Kemampuan Program Pemberdayaan	54
b. Kesesuaian isi Program Pemberdayaan	56
2. Tepat Pelaksana.....	57
a. Instansi Pelaksana Program Pemberdayaan	58
b. Sumber Daya Pelaksana Program Pemberdayaan	59
3. Tepat Target	61
a. Kesesuaian sasaran program pemberdayaan	61
b. Kesesuaian Sasaran Program dengan Program Lain	63
4. Tepat Lingkungan	64
a. Lingkungan Internal	64
b. Lingkungan Eksternal.....	65

5. Tepat Proses	66
a. Pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan.....	66
b. Penerimaan Masyarakat terhadap program Pemberdayaan.....	68
C. Faktor Penghambat	70

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR KEPUSTAKAAN	73
---------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Jumlah Anak Pustus Sekolah Di Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2019	6
I.2 Data Anak Putus Sekolah yang telah di Bina oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan telah memperoleh pekerjaan tahun 2016-2019	6
I.3 Data Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Bengkalis yang di Bina di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Di Kota Pekanbaru	8
II.1 Penelitian Terdahulu	25
II. 2 Operasional Variabel	29
III.1 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	36
IV.1 Tabel Penduduk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	43
V.1 Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
V.3 Identitas Informan Berdasarkan Umur	51

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
II.1 Kerangka Pikir.....	26



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Wawancara Penelitian Dan Observasi.....	75
Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	78
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	79
Lampiran 4 Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan	80
Lampiran 5 Surat Keterangan Dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	81
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	82



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Indra Lesmana
Npm : 157310635
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensi Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian kprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 23 Oktober 2020
Pernyataan

Indra Lesmana

EVALUASI PROGRAM DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN REMAJA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

Indra Lesman

Kata kunci : Evaluasi , Pemberdayaan, Remaja Putus Sekolah

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis dan juga mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif. Penulisan ini menggambarkan kondisi secara objek yang di temukan dilapangan berdasarkan data data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ,dengan Wawancara dan Observasi sebagai alat pengumpulan data, dan data yang di kumpulkan kemudian disajikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi Empiris dan Objektivitas keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Terdapat 3 Kelompok menjadi objek dalam Penelitian. Penulisan Terdiri dari Data Primer yang sama di peroleh melalui alat penelitian berupa wawancara serta Observasi dan Data sekunder yang di peroleh dengan hasil wawancara sesuai dengan hasil penelitian memperoleh Kesimpulan yaitu dalam Pelaksanaan mendeskripsikan Evaluasi Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis di Kategorikan Kurang karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan remaja putus sekolah seperti masih kurangnya sosialisasi yang diberikan serta sumberdaya dalam pelaksanaan pemberdayaan remaja putus sekolah yang harus di perhatikan.

EVALUATION OF SOCIAL SERVICES PROGRAMS IN EMPOWERING YOUTH DISCONTINUED SCHOOLS IN BENGKALIS DISTRICT

ABSTRACT

Indra Lesmana

Keywords: Evaluation, Empowerment, School Dropout Adolescents

The purpose of this study is to describe the Evaluation of the Empowerment Program for Dropout Adolescents in Bengkalis Regency and also to describe the obstacles in its implementation. This research uses qualitative methods with descriptive analysis techniques. This writing describes the conditions objectively found in the field based on data data relating to problems in the implementation of the Empowerment Program by the Bengkalis Regency Social Service, with interviews and observations as data collection tools, and the data collected is then presented as the main raw material for analyzing the Empirical conditions and the objectivity of the existence and objectives of the research at the location under study. There are 3 groups to be objects in the study. Writing consists of the same primary data obtained through research tools in the form of interviews and observations and secondary data obtained with the results of interviews in accordance with the results of the research, the conclusion is that in the implementation of describing the Evaluation of School Dropout Empowerment Programs in Bengkalis Regency it is categorized as Lack because there are still There are several obstacles in the implementation of the empowerment program for school dropouts, such as the lack of socialization provided and resources in implementing the empowerment of school dropouts that must be considered.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan guna membangun masyarakat yang sejahtera, khususnya masyarakat marjinal yaitu kelompok masyarakat tergolong lemah dan tidak mampu. Hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yaitu pada Pasal ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu penanganan masalah di bidang sosial juga harus menjadi prioritas oleh pihak pemerintah. Hal ini melihat bahwa pada kenyataannya masih banyak kelompok masyarakat yang lemah dan tidak mampu yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesejahteraan sosial. Dalam kaitan ini pihak pemerintah dapat memberdayakan kelompok masyarakat tersebut melalui kebijakan maupun program-program kerjanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 1 poin 1 menjelaskan bahwa: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Dalam upaya membangun Kesejahteraan Sosial masyarakat, maka pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 1 poin 2 bahwa: “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

Oleh sebab itu pihak pemerintah harus mampu menyusun kebijakan atau program yang tepat dalam rangka menyelenggarakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sehingga mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 3, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan dan membangun Kesejahteraan Sosial masyarakat, maka oleh pihak pemerintah berupaya melaksanakan pemberdayaan sosial

masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menyusun dan menerapkan berbagai program pemberdayaan, dengan tujuan untuk dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu masalah di bidang sosial yang masih ditemui di tengah-tengah masyarakat adalah remaja putus sekolah. Pada umumnya permasalahan sosial ini muncul karena faktor kemiskinan dan kondisi finansial keluarga yang kurang mampu membiayai sekolah anak, atau dikarenakan sikap orang tua yang memperhatikan pendidikan anak. Masalah sosial remaja putus sekolah ini juga perlu mendapat perhatian serius oleh pihak pemerintah melalui program pemberdayaan sosial agar mereka dapat dibina dan diberdayakan, dan sekaligus menjadi solusi untuk dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Dengan demikian, maka diharapkan mereka mampu secara mandiri hidup layak dan bermartabat.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang Sosial merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Penanganan bidang sosial merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bagi Pemerintah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka pemerintah telah membentuk kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nantinya diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Demikian pula halnya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, yang mana sehubungan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membentuk Dinas Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sementara itu Tugas dan Fungsi Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Permasalahan remaja putus sekolah pada kenyataannya masih sering dijumpai di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bengkalis. Remaja putus sekolah memang tidak seluruhnya menimbulkan permasalahan sosial dimana sebagian dari mereka ada yang bekerja membantu perekonomian keluarga, seperti berdagang, bertani dan lain sebagainya. Namun demikian tidak jarang sebagian dari para remaja putus sekolah tersebut terjerumus kepada pergaulan dan tindakan yang menyimpang dan bahkan berhadapan dengan hukum. Sementara untuk

melamar pekerjaan di suatu perusahaan tidak memungkinkan dikarenakan minimnya kemampuan kerja atau keterampilan yang mereka miliki, sehingga mereka terpaksa menganggur. Bertambahnya angka pengangguran karena dampak dari remaja putus sekolah pada akhirnya bisa menimbulkan dampak sosial lainnya yang dapat merugikan banyak pihak.

Mengingat akibat fatal yang mungkin timbul jika remaja putus sekolah dibiarkan tanpa adanya upaya pembinaan, serta upaya membina keterampilan kerja bagi remaja putus sekolah tersebut sehingga mereka memiliki suatu keahlian khusus yang dibutuhkan dunia kerja, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, telah melaksanakan program kerja dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu dengan melaksanakan “Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.” Adapun salah satu kegiatan dari tersebut yaitu Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah dari keluarga tidak mampu.

Program pemberdayaan Remaja Putus Sekolah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan bekal keahlian/keterampilan khusus. Dengan demikian, diharapkan dapat berguna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat anak putus sekolah di daerah tersebut. Adapun jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Bengkalis khususnya selama tahun 2016 hingga tahun 2019 seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.1. Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2019

Tahun	Jenjang Pendidikan		Jumlah
	SD/Sederajat (orang)	SMP/Sederajat (orang)	
2016	36	47	83
2017	39	6	45
2018	147	220	367
2019	28	15	43

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2019

Dari data anak putus sekolah tahun 2016 – 2019 pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih relatif tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis. Anak putus sekolah ini terutama disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi orang tua sehingga anak tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Di samping itu angka putus sekolah tersebut juga dapat diakibatkan kurangnya perhatian atau kepedulian pihak orang tua terhadap pendidikan anak. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah melakukan program pembinaan bagi anak putus sekolah. Sebagai gambaran mengenai anak putus sekolah yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2. Jumlah Anak Putus Sekolah yang Telah Dibina Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Telah Memperoleh Pekerjaan Tahun 2016 – 2019

Tahun	Jumlah yang Dibina (orang)	Jumlah yang Telah Bekerja (orang)
2016	83	83
2017	45	45
2018	367	367
2019	43	43

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis yang dibina oleh Dinas Sosial setempat masih relatif

kecil dibandingkan dengan jumlah remaja putus sekolah. Program pembinaan Remaja Putus Sekolah yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dilakukan bagi remaja putus sekolah yang tidak menyelesaikan pendidikannya, baik pada jenjang pendidikan tingkat dasar maupun menengah yang berumur 15 s/d 18 tahun. Dalam rangka melaksanakan pemberdayaan Remaja Putus Sekolah yang ada di Kabupaten Bengkalis, maka Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menjalin mitra kerja dengan beberapa pihak, antara lain yaitu Dinas Pendidikan dan pihak swasta/wirausaha setempat serta UPT Kementerian Sosial yakni Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru.

Panti Sosial Bina Remaja Pekanbaru merupakan salah satu mitra kerja yang cukup penting dalam menerapkan program pembinaan anak putus sekolah. Panti Sosial Bina Remaja Pekanbaru adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Sosial RI yang memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan kepada remaja putus sekolah terlantar dari keluarga tidak mampu agar terwujudnya kemandirian serta terhindar dari berbagai kemungkinan timbulnya masalah sosial bagi dirinya. Adapun peran dan tanggungjawabnya yaitu:

- a. Sebagai pelaksana kebijakan dari Kementerian Sosial RI dalam melaksanakan program pelayanan kesejahteraan sosial.
- b. Sebagai fasilitator antara Kementerian Sosial dengan remaja putus sekolah.
- c. Suatu lembaga yang memberikan keterampilan kepada remaja putus sekolah, agar terwujudnya kemandirian dan keberfungsian sosial dalam masyarakat.

Bekal keterampilan khusus yang diberikan untuk memberdayakan Remaja Putus Sekolah tersebut yaitu melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan antara lain seperti keterampilan: otomotif, teknik las, tata rias, dan menjahit. Sebagai gambaran Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis yang telah dibina di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru, khususnya selama tahun 2011 – 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis yang Dibina di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru Tahun 2011 – 2018

Tahun	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan				Jumlah
	Otomotif	Teknik Las	Tata Rias	Menjahit	
2011	21	1	4	5	31
2012	8	2	4	10	24
2013	16	5	3	4	28
2014	5	6	1	3	15
2015	4	2	2	2	10
2016	6	1	-	2	9
2017	5	1	1	1	8
2018	4	2	2	2	10

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis yang dikirim Dinas Sosial setempat untuk dibina di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru selama tahun 2011 – 2018 cenderung terjadi penurunan setiap tahunnya. Di samping jumlah Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis yang dibina melalui Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru selama tahun 2011 – 2018 relatif kecil jika dibandingkan dengan angka Remaja Putus Sekolah.

Program pemerintah merupakan keputusan atau pilihan terbaik yang diambil dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah dalam upaya untuk mengatasi atau menanggulangi suatu masalah di tengah-tengah masyarakat. Untuk

mengetahui sejauhmana efektivitas dan tingkat keberhasilan program tersebut maka perlu dilakukan evaluasi. Di samping itu, berdasarkan hasil evaluasi itu maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusun kebijakan untuk mengambil kebijaksanaan selanjutnya untuk penyempurnaan program pemerintah di masa mendatang.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial merupakan program pemerintah yang cukup penting dalam upaya mengatasi masalah sosial seperti halnya pemberdayaan remaja putus sekolah di berbagai daerah melalui Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Namun berdasarkan prasurvey penulis sehubungan dengan pelaksanaan pemberdayaan remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis mengindikasikan fenomena antara lain sebagai berikut:

1. Setiap program yang dijalankan pemerintah harus didukung kesiapan sumberdaya. Namun kurangnya kesiapan instansi dalam menjalankan program pemberdayaan remaja putus sekolah, sehingga jumlah remaja putus sekolah yang dapat dibina atau diberdayakan antara lain seperti melalui kegiatan pelatihan keterampilan, masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah Remaja Putus Sekolah.
2. Prosedur dan persyaratan yang diterapkan dalam rekrutmen relatif masih menyulitkan bagi remaja putus sekolah yang akan mengikuti kegiatan pemberdayaan, sehingga menimbulkan keengganan bagi anak putus sekolah untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program pembinaan oleh Dinas Sosial.

3. Kurangnya sosialisasi program mengenai pemberdayaan remaja putus sekolah yang dilakukan pihak Dinas Sosial, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menerima dan menyadari pentingnya program kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dalam rangka pemberdayaan remaja putus sekolah.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai: **“Evaluasi Program Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Di Kabupaten Bengkalis.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan Program Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Di Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik, Penelitian di harapkan menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas masalah ini lebih tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang.
- b. Secara teoritis, Penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu Pemerintahan.
- c. Untuk penulis sebagai salah satu syarat tugas akhir perkuliahan serta menambah ilmu,



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintah

Ndraha (2011;6) mengartikan pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Wasistiono (2013;12) melihat pemerintah sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melindungi, melayani, memfasilitasi kepentingan negara dan publik sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala dan peristiwa pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik.

Sementara pemerintahan, menurut Ndraha (2011;5) adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Yusri Munaf dalam bukunya Hukum Administrasi Negara (2016;47), menjelaskan bahwa Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Sumaryadi (2010;16) mendefenisikan pemerintahan sebagai sebuah organisasi yang memiliki :

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik.
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik.
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan suatu organisasi/kelembagaan yang mempunyai otoritas atau kekuasaan serta legitimasi untuk memerintah sesuai amanat konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Dengan otoritas atau kekuasaan serta legitimasi yang dimilikinya, maka suatu organisasi pemerintahan dapat melaksanakan fungsinya secara optimal untuk kemajuan bangsa, negara, dan masyarakat.

Fungsi pemerintah menurut Ndraha (2011;76) ada dua macam pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder, sebagai berikut:

1. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai *provider* jasa – publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi.

Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti, semakin

tinggi tariff hidup, semakin kuat *bargaining position*, semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin kurang fungsi skunder pemerintah.

2. Ilmu Pemerintahan

Maulidiah (2014:1-2) secara umum pemerintahan yaitu orang atau sekelompok orang yang memberikan pernyataan yang sah oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang, yang diberikan legitmasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas Pemerintahan yang dalam arti ini adalah menyelenggarakan pelayanan pemerintah, pelayanan pembagunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga Pemerintah memiliki fungsi dasar yakni Pelayanan.

Menurut Nia Kurniati (2015:208) Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerinthaan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhandan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Ilmu pemerintahan pada dasarnya merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri dan otonom yang memiliki metode tersendiri sebagai pendekatan dalam melakukan kajian dan penelusuran terhadap gejala atau peristiwa pemerintahan Petrus Polyando (2016:50).

Menurut Syafiie (2005:20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu seni dikatakan ilmu seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerinahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat di pelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untk melakukan atau tidak melakukan . konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dikenal oleh pemerinah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerinta menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui jalan itu rusak dan pemerintah tidak membuat kebijakan memperbaikinya bearti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut di buat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan oleh badan pemerintahan.

Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun di sadari bahwa kebijakan publik dapat di pengaruhi oleh para aktor di luar pemerintahan.

kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Taufiqqurohman, 2014;49).

Kebijakan publik mempunyai pengertian yang variatif tergantung dari siapa yang mengemukakan sehingga tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu pengertian yang representatif memuaskan. Menurut James Anderson (Islamy, 2000:17).

Menurut William Dunn dalam Abdul Aziz (2013;3) setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Menurut Mary Isomawati Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Lingkup kebijakan publik dapat dikatakan sangatlah luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan seperti kebijakan bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertanahan dan lain sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun

lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah Kabupaten/Kota dan keputusan Bupati/Walikota.

kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu, yang benar-benar dapat dilakukan dan diimplementasikan untuk memecahkan atau sebagai solusi terhadap public problems (Yulianto Kadji, 2015; 16).

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politis nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktifitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktifitas yang bersifat intelektual. Proses kebijakan publik.

Menurut Dunn (2003:24-25) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan diantaranya adalah :

1. Penyusunan, pada tahap ini pejabat yang di pilih dan diangkat menetapkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak tersentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
2. Formulasi kebijakan, pada tahap ini pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
3. Adopsi kebijakan, pada tahap ini, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsesus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan, pada tahapan ini kebijakan telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, pada tahap ini unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam

pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

4. Konsep Evaluasi Kebijakan

Menurut Ndraha (2011;498) kebijakan pemerintahan adalah usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Frietrich dalam Winarno (2012;20) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan – hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan program, sebagaimana didefinisikan Arikunto dan Jabar (2004:3) adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang terjadi dalam suatu organisasi dan melibatkan sekelompok orang.

Selanjutnya menurut Arikunto dan Jabar (2004:5) bahwa “program terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan”. Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu:

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan
2. Terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan jamak berkesinambungan.

3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Setiap program/kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan atau dijalankan perlu dievaluasi agar dapat dinilai hasilnya. Menurut Nugroho (2004:183), evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejahterama tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Dalam hal keefektifan implementasi kebijakan terdapat lima tepat yang perlu dipenuhi, yaitu (Nugroho, 2014: 686-688):

- a. Tepat kebijakan, ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- b. Tepat pelaksanaannya, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
- c. Tepat target, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

- d. Tepat lingkungan, lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.
- e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses. Yaitu *Policy Acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Strategic Readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

Ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan, tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut; (2) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, maka evaluasi harus menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan yang ada. Yang seringkali terjadi dalam praktiknya ialah tujuan telah tercapai tetapi masalah tidak terselesaikan; dan (3) Evaluasi kebijakan

berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil-hasil dari penilaian evaluasi tersebut dijadikan bahan belajar bagi para pelaku kebijakan yang lain (Agustino, 2008;186).

5. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia, yang meliputi (Surmayadi, 2005;114):

- a. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan prestasinya dan menciptakan iklim/suasana untuk berkembang.
- b. Memperkuat daya, dan potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif berkembangnya.
- c. Penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses kepeluang-peluang.

Pemberdayaan merupakan sarana sekaligus tujuan. Salah satu indikasi utama keberhasilan pembangunan masyarakat yang menggunakan perspektif pemberdayaan adalah turunnya angka kemiskinan. Proses pemberdayaan dapat dianggap sarana untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan asumsi bahwa sumber kemiskinan adalah ketidakberdayaan. Dengan demikian agar kemiskinan dapat dikurangi diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat terutama lapisan bawah atau miskin (Soetomo, 2011;234).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (Suharto, 2006;58):

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan;
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, strategi kebijakan yang dilaksanakan agar diarahkan pada :

- a. Membangun kelembagaan sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi secara kompetitif dan berdaya saing tinggi, yang diharapkan dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan upaya perlindungan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang mengalami musibah, bencana, dan kesulitan lainnya.

- d. Mengembangkan lembaga keswadayaan untuk membangun solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat untuk memperkuat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Membutuhkan terciptanya iklim politik yang kondusif sebagai dukungan keberhasilan bagi pemberdayaan masyarakat (Adisasmita, 2011;136).

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan sebagai berikut (Suharto, 2006;67):

1. Pemungkinan: yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan: yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini antara lain ialah yang di Penulis terdahulu ini penulis ambil dari beberapa skripsi terdahulu sebagai panduan untuk penulis mengembangkan dan menggunakan beberapa teori yang di pakai di dalam nya. Dari hasil perbandingan terhadap sumber terdahulu penulis belum menemukan persoalan yang sama terkait dengan apa yang di buat oleh penulis akan tetapi penulis mengambil beberapa bahan panduan untuk lebih bisa mengembangkan penelitian yang di teliti penulis,

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

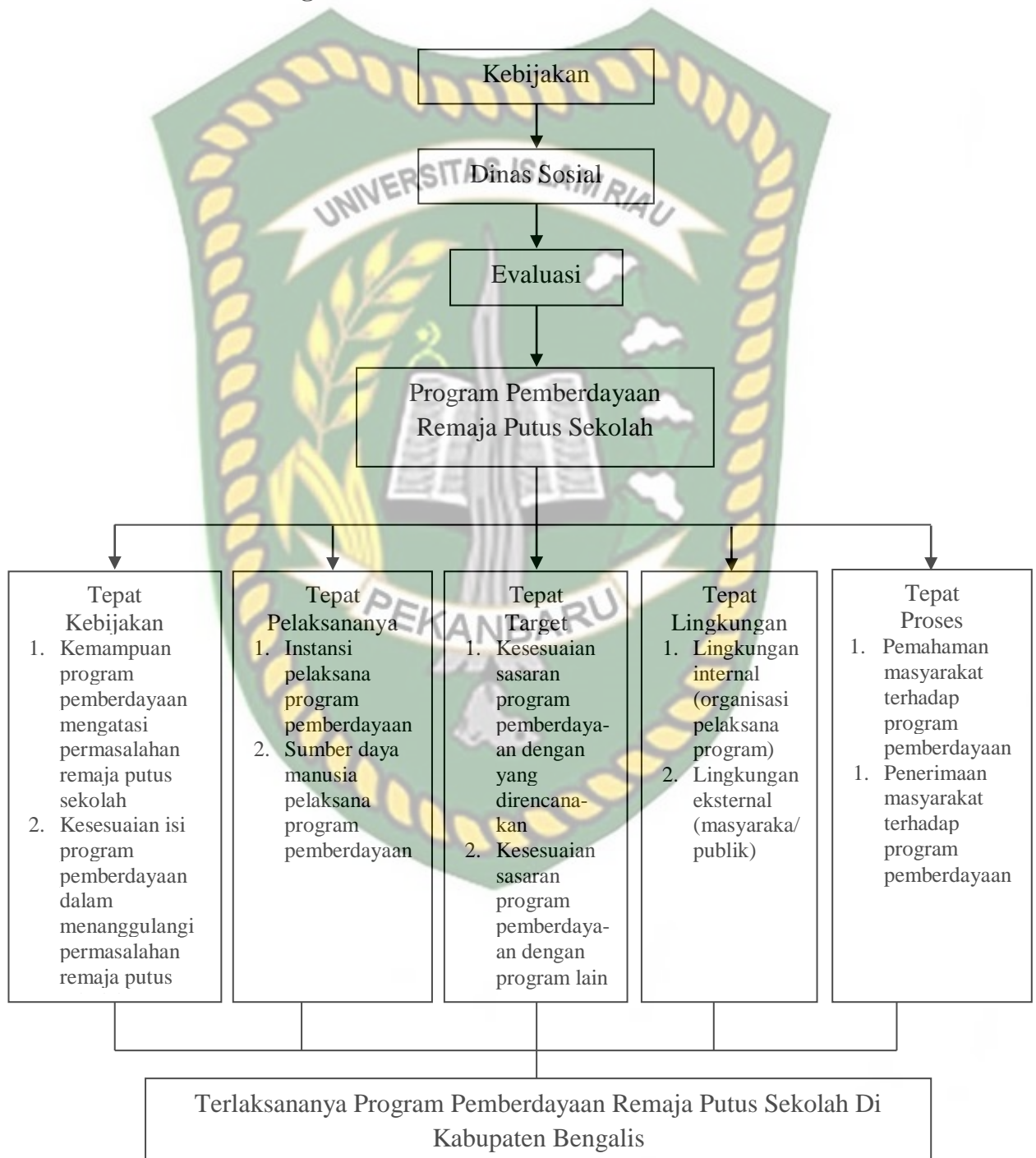
No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Evi Zubaidah, Elma Fikri Lubis (2018)	Evaluasi Proses Bimbingan Keterampilan Pada Remaja Putus Sekolah	Menggunakan metode Deskriptif kualitatif	Pada penelitian ini menggunakan Konsep dari MerileeS. Grindle dan penelitain sebelumnya menggunakan teori Edward III
2	Ade Akbar Aprianta (2015)	Evaluasi Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2015	Menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Pada penelitian ini bentuk programnya ditujukan pada gelandangan sedangkan penelitian sebelumnya pada anak putus sekolah
3	Siti Umayah (2013)	Peranan Panti Bina Remaja Rumbai dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Jenis Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif	Pada penelitian ini menggunakan Konsep dari Gibson dan penelitain sebelumnya menggunakan teori Edward III
4	Suryo Widodo (2015)	Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja Majar Tabela di Kota Palangkaraya	Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan yang dilakukan pada Panti Sosial terhadap Remaja Putus Sekolah

C. Kerangka Pikir

Dari beberapa penjelasan konsep teori dan teori dalam studi perpustakaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya penulis akan merumuskan kerangka pikir penelitian tentang Evaluasi Program Dinas Sosial dalam

Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar II.1. Kerangka Pikir



D. Konsep Operasional

Konsep operasional disusun untuk menjelaskan konsep dan peristilahan yang dipergunakan dalam penulisan laporan hasil penelitian. Konsep operasional dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1 Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang terjadi dalam suatu organisasi dan melibatkan sekelompok orang.
- 2 Pemberdayaan ialah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan publik.
- 3 Remaja Putus Sekolah ialah remaja yang putus sekolah karena satu atau alasan lain meninggalkan sekolah dan tidak menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah yang ditentukan.
- 4 Kabupaten Bengkalis ialah salah satu kabupaten yang berada di dalam wilayah Provinsi Riau dengan ibukota Bengkalis.
- 5 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ialah salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan tugas dan fungsi menangani permasalahan bidang sosial.
- 6 Evaluasi ialah menilai sejauhmana keefektifan kebijakan atau program-program publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Adapun kriteria evaluasi yang digunakan untuk mengetahui efektivitas

program pemberdayaan bagi Remaja Putus Sekolah yang diterapkan Dinas Sosial pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah:

- a. Tepat program, yaitu ketepatan kebijakan atau program dinilai dari sejauh mana kebijakan atau program yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
- b. Tepat pelaksanaannya, yaitu ketepatan lembaga/instansi pelaksana yang menjadi implementor program.
- c. Tepat target, yaitu apakah target program yang diintervensi melalui penerapan program tersebut sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi program lain, dan apakah target program dalam kondisi siap diintervensi atau tidak.
- d. Tepat lingkungan, yaitu ketepatan lingkungan internal program yang berkaitan dengan interaksi diantara perumus program dan pelaksana program dengan lembaga lain yang terkait, serta lingkungan eksternal program yang berkaitan dengan persepsi publik terhadap program.
- e. Tepat proses, yaitu publik memahami dan menerima program sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan, dan publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari penerima.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2 Operasionalisasi Variabel Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi: adalah menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya, sejauhmana tujuan dicapai, dan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan” (Nugroho, 2004:183).	Program Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Di Kabupaten Bengkalis	a. Tepat Program	1. Kemampuan program pemberdayaan mengatasi permasalahanremaja putus sekolah 2. Kesesuaian isi program pemberdayaan dalam menanggulangi permasalahan remaja putus sekolah
		b. Tepat Pelaksananya	1. Instansi pelaksana program pemberdayaan 2. Sumber daya manusia pelaksana program pemberdayaan
		c. Tepat Target	1. Kesesuaian sasaran program pemberdayaan dengan yang direncanakan 2. Kesesuaian sasaran program pemberdayaan dengan program lain
		d. Tepat Lingkungan	1. Lingkungan internal (organisasi pelaksana program) 2. Lingkungan eksternal (masyarakat/publik)
		e. Tepat Proses	1. Pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan 2. Penerimaan masyarakat terhadap program pemberdayaan

Sumber: Modifikasi penelitian, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2005;63).

Sementara metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengosilasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2013;4).

Selanjutnya menurut Moleong (2013;6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan

lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai sejauhmana keefektifan program Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam dalam memberdayakan Remaja Putus Sekolah, yang dilaksanakan melalui instansi terkait yakni Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh dan ditemukan selama proses penelitian berlangsung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, yang beralamat Jalan Antara - Bengkalis - Propinsi Riau. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan pembedayaan Remaja Putus Sekolah yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan suatu program yang sangat penting dalam pembangunan bidang sosial. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

C. Informan dan Key Informan

Informan yang dimaksud merupakan pihak yang menjadi sumber data atau responden yang memberikan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian ini. Adapun sebagai informan dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis (1 orang).
2. Instruktur Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah (1 orang).
3. Penerima Manfaat/Peserta Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis (2 orang).

Dalam penelitian ini yang merupakan *Key Informan* (Informan Kunci) adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian atau responden/informan penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan responden atau informan penelitian, mengenai Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari obyek penelitian atau instansi tertentu yang menjadi obyek penelitian maupun dari sumbe lainnya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data dan informasi berupa berbagai dokumen yang tersedia di instansi terkait tempat penelitian

dilakukan, antara lain seperti profil instansi, peraturan perundang-undangan, dan data lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian.

Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data sekunder biasanya telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen. Mengenai data sekunder itu, peneliti tidak banyak dapat berbuat untuk menjamin mutunya. Dalam banyak hal peneliti akan harus menerima menurut apa adanya (Suryabrata, 2004:39).

Jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam *audio tapes*, pengambilanfoto atau film. (Lofland dalam Moleong, 2006: 157).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu cara yang diterapkan peneliti dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dari subjek penelitian sebagai bahan analisis dalam suatu penelitian. Dalam upaya untuk mendapat data penelitian yang dibutuhkan maka penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2013;186). Jadi, wawancara merupakan kegiatan peneliti dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan yang dilakukan dengan pihak instansi terkait sebagai responden, berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara penelitian tentang pelaksanaan Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dapat dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan fakta serta informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini data dan fakta serta informasi dikumpulkan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai keadaan atau dinamika yang dapat diamati tanpa menggunakan alat atau instrumen terhadap objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian, yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen, laporan-laporan, literatur/buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu cara yang diterapkan peneliti dalam menelaah data yang telah diperoleh dan ditemukan selama proses penelitian berlangsung. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. (Bogdan & Biklen dalam Moleong, (2013:248).

Adapun tahap dalam analisis data kualitatif yaitu melalui proses *pertama* mencatat hasil catatan lapangan, *kedua* mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat iktisar dan membuat indeks, dan *ketiga* mencari makna data, menemukan pola dan hubungan antar data serta membuat temuan-temuan umum (Drury dalam Moleong, 2006: 248).

Dalam penelitian ini data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data kualitatif tersebut, maka penulis dapat menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis, dan kemudian mengambil kesimpulan hasil penelitian.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkali sini dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis, Tahun 2019/2020

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu																	
		Okt 2019 – Apr 2020				Mei 2020			Jun 2020		Jul 2020			Agu 2020					
1.	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	X	X	X	X														
2.	Seminar Usulan Penelitian					X													
3.	Perbaikan usulan penelitian					X	X												
4.	Riset						X												
5.	Penelitian lapangan							X											
6.	Penelitian dan analisis Data								X	X									
7.	Penyusunan laporan Penelitian									X	X								
8.	Konsultasi bimbingan Skripsi											X	X	X	X	X	X		
9.	Ujian Skripsi																X		
10.	Revisi dan Pengesahan																X	X	
11.	Penggandaan serta penyerahan skripsi																		X

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun Sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini di bahas 6 bab, dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai antara satu dengan yang lainnya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya di bahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini membahas landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan di uraikan kerangka pikir, konsep operasional dan operasional penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini tentang Metode Penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan uji hipotesis, jadwal kegiatan penelitian serta rencana sistematika laporan penelitian

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Deskripsi lokasi penelitian yang terdiri dari Gambaran Kabupaten Bengkalis. Fungsi, Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Serta Sumber Daya Manusia, Dan Lokasi Penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis.

BAB VI PENUTUP

Pada bab akhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya dalam dua sub bab yaitu yang terdiri dari Kesimpulan mengenai ringkasan penelitian penulis dan Saran berupa solusi dan mengatasi sejumlah permasalahan yang menjadi objek penulisan naskah.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

1. Keadaan Geografis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis Merupakan salah satu Kabupaten Di Provinsi Riau, dengan ibu kota Bengkalis, Sejak Dahulunya di kenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang baik sektor migas yaitu minyak bumi maupun non migas berupa hasil komoditi perkebunan, pertanian, peternakan dan pariwisata. Disamping kaya akan potensi sumber daya alamnya, wilayah Kabupaten bengkalis memiliki letak yang strategis, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan berada pada kawasan segitiga pertumbuhan indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT).

Secara histori wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, Sebagian besar berada di wilayah pemerintahan kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah di Proklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Diikuti dengan penyerahan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, Maka seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1956 yakni berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1956 di bentuklah kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang pada waktu itu masih berada di bawah Provinsi Sumatra Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di sumatra Utara, Dengan di bentuknya

Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Sumatra Barat, Riau dan Jambi , maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Selanjutnya setelah terjadi pemekaran Daerah, Kabupaten Bengkalis yang semula jumlah penduduknya merupakan jumlah penduduk terbanyak di provinsi Riau yaitu dengan Jumlah 1.182.267 jiwa namun setelah pemekaran terjadi 545.737 jiwa dengan luas wilayah yang sejumlahnya 30.646,83 Km² menjadi 7.773.93 Km² . Utara yang wilayahnya berada pada posisi 2030'LU-0017LU dan 100052'BT-102010'BT, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Selat Malaka
- Sebelah selatan : Berbatasan Dengan Kabupaten Siak
- Sebelah barat : Berbatasan dengan kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu, Sebelah Timur : Berdasarkan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Bengkalis Berkaitan Propis yang sangat di pengaruhi oleh sifat iklim laut, dengan temperatur berkisaran 26°C – 32°C. Musim Hujan biasa terjadi antara bulan september hingga januari, dengan curah hujan biasa berkisaran antara 809-4.078 mm/tahun. Sedangkan periode Kering (Musim Kering) biasanya terjadi antara bulan Febuari hingga Agustus. Berdasarkan jumlah kecamatan yang ada di kabupaten bengkalis, Kabupaten Bengkalis terbagi atas 11 Kecamatan Sebagai berikut :

1. Kecamatan Bengkalis Dengan Luas Wilayah 514.00 Km²
2. Kecamatan bantan Dengan Luas Wilayah 424,40 Km²
3. Kecamatan Bukit Batu Dengan Luas Wilayah 1.128.00 Km²
4. Kecamatan Mandau Dengan Luas Wilayah 937,47 Km²
5. Kecamatan Rupert Dengan Luas Wilayah 896,35 Km²
6. Kecamatan Rupert Utara Dengan Luas Wilayah 628,50 Km²
7. Kecamatan Pinggir Dengan Luas Wilayah 2.503.00 Km²
8. Kecamatan Siak Kecil Dengan Luas Wilayah 742,21 Km²
9. Kecamatan Bathin Solapan Dengan Luas Wilayah
10. Kecamatan Tualang Mandau Dengan Luas Wilayah
11. Kecamatan bandar Laksamana Dengan Luas Wilayah

2. **Keadaan Penduduk Kabupaten Bengkalis**

Kabupaten Bengkalis Merupakan kota Berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mangadu nasib di kabupaten Bengkalis , Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap bengkalis, sering semakin banyaknya warga pendatang untuk mencakup di kabupaten Bengkalis, pemerintah Kabupaten bengkalis harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan di mulai dari pendapatan warga,penataan rumah penduduk, penyedia lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik di sektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya, sehingga kesejahteraan penduduk Kabupaten Bengkalis tetap terjamin.

Sebagian besar peduduk yang mendalami wilayah Kabupaten Bengkalis adalah suku melayu, Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan

penduduk pematang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

B. Profil Kecamatan Bantan

a. Geografis

Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang berada di pulau Bengkalis yang mempunyai batas-batas wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis dan Selat Malaka
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

Sedangkan letak wilayahnya adalah :

- 1°15' Lintang Utara s/d 1°36'43" Lintang Utara
- 102°00' Bujur Timur s/d 102°30'29" Bujur Timur

Berdasarkan data dari Kantor Camat Bantan, luas wilayah Kecamatan Bantan adalah 424 km², dimana desa terluas adalah Desa Teluk Pambang dengan luas 114 km² atau 26,89% dari luas keseluruhan kecamatan Bantan, diikuti oleh Desa Selat Baru 63 km² (14,86%) dan Bantan Tengah 51 km². Desa dengan jarak terjauh dari ibukota kecamatan Bantan adalah Desa Teluk Lancar dengan jarak 37 km². Dan jarak terdekat adalah Desa Selat Baru sebagai ibukota Kecamatan Bantan.

Tabel IV.I Tabel Penduduk Kecamatan Bantan Menurut Desa/Kelurahan

NO	Desa/Kelurahan	RT/RW	Laki/Laki	Wanita	Jumlah	Jumlah kk
1	Bantan Tengah	32/15	1.699	1.644	3.343	1.012
2	Bantan Air	26/12	1.109	1.030	2.139	689
3	Bantan Tua	15/6	1.400	1.329	2.729	761
4	Teluk Pambang	18/6	654	673	1.327	475
5	Selat baru	36/15	2.195	2.032	4.227	1.258
6	Teluk Lancar	23/4	1.060	983	2.043	572
7	Kembung Luar	21/8	1.205	1.088	2.293	670
8	Jangkang	16/8	1.265	1.112	2.377	670
9	Muntai	16/6	984	870	1.854	542
10	Resam Lapis	17/7	792	791	1.583	463
11	Berancah	35/13	1.475	1.343	2.818	788
12	Ulu Pulau	22/10	881	791	1.677	490
13	Menyatan	16/6	581	539	1.120	348
14	Pambang Pesisir	25/6	696	686	1.382	377
15	Sukamaju	39/10	1.140	1.031	2.171	572
16	Pambang Baru	16/6	792	707	1.499	444
17	Kembung Baru	22/7	945	875	1.820	468
18	Pasiran	19/6	637	605	1.242	339
19	Bantan Sari	15/6	577	555	1.132	300
20	Bantan Timur	20/8	807	722	1.529	418
21	Teluk Pepal	25/11	1.129	981	2.110	591
	Jumlah	508/188	23.154	21.409	44.563	12.834

Sumber : Kantor Camat Bantan

b. Pemerintahan

Kecamatan Bantan mempunyai sembilan desa yang sudah defensif, yaitu desa Teluk Lancar, Kembang Luar, Teluk Pambang, Muntai, Bantan air, Bantan tengah, Selat baru, Bantan Tua dan jangkang. Kesembilan desa itu merupakan desa swakaryasampai akhir tahun 2009, terdapat 85 RW dan 299 RT di Kecamatan Bantan, Dengan Jumlah RW terbanyak berada di Desa Selat Baru dan Jumlah Rt terbanyak di Desa Teluk Pambang

c. Ekonomi

Pada tahun 2011, Berdasarkan data dari UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat, 43 Industri kecil dan, 422 Industri Mikro, jumlah usaha perdagangan yang terdaftar paling banyak terdapat di Desa Selat baru, Hal ini di sebabkan Desa Selat baru merupakan Ibu kota Kecamatan. Jumlah Koperasi yang terdaftar di kecamatan Bantan adalah 5 KUD dan 44 Non- KUD.

C. Deskripsi Umum Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Pada tanggal 22 Desember 1948 dibentuk inspeksi Sosial dari tinggkat pusat hingga daerah, pada tahun 1950 berganti nama lagi menjadi Jawatan Sosial Republik Indonesia. Departemen sosial menetapkan kantor wilayahnya di setiap provinsi dan menetapkan petugas Sosial Kecamatan yang berada di tiap-tiap Kota /Kabupaten.

Sejak diperkuatnya pelaksanaan prinsip Otonomi dimana keberadaan Pemerintah Daerah berhak mengurus sendiri rumah tangganya, hal ini

berimplikasi juga dengan satuan tugas Departemen Sosial Republik Indonesia yang sebelumnya berkoordinasi langsung dengan kementerian kini harus berada dibawah payung Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu berganti nama menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau dan pada tingkat kabupaten/kota menjadi Dinas Sosial . Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagai Dinas wilayah Kabupaten Bengkalis berada dalam satuan kerja pemerintahan daerah, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berada di Jl. Antara Bengkalis. Berdasarkan dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengamanatkan Kabupaten Bengkalis terhadap kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan rumah tangga daerahnya sendiri beserta kelengkapannya. Maka salah satu kewenangan tersebut yang diberikan kepada Kabupaten Bengkalis dan menjamin terlaksananya fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis salah satunya terkait dengan permasalahan sosial dibentuklah Dinas Sosial dibarengi dengan permasalahan pemakaman di Kabupaten Bengkalis

2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sementara itu Tugas dan Fungsi Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial.
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial.
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial.
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1 Subbag Penyusunan Program
 - 2 Subbag Umum dan Kepegawaian dan
 - 3 Subbag Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari
 - 1 Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 2 Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dan
 - 3 Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari
 - 1 Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 2 Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan

- 3 Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari
 - 1 Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga
 - 2 Seksi Pemberdayaan Sosial, Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dan
 - 3 Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari
 - 1 Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - 2 Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 - 3 Seksi Pengolahan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial
- g. Unit Pelaksana Teknis dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu bagian dalam organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas yang cukup penting dalam pembangunan bidang sosial masyarakat. Adapun tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.

4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, pembinaan muafaf, restorasi sosial dan pemakaman.
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
6. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial, dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan. Dalam kaitan ini maka Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah menerapkan Program Pemberdayaan bagi Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Identitas Informan

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mengenai Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis Distribusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel V.1 : Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	3	90%
2	Perempuan	1	10%
Jumlah		4	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang dengan persentase 90%, dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang dengan persentase 10%. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan Informan dalam penelitian ini di dominasi oleh laki-laki.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	-	-
2	SD	-	-
3	SMP	2	50%
4	SMA	-	-
5	D1-D3	-	-
6	D4-S1	1	40%
7	S2	1	10%
8	S3	-	-
Jumlah		4	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMP sebanyak 2 orang

atau 50%, sarjana sebanyak 2 orang atau 50%, Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa Informan seimbang antara SMP dan Sarjana yaitu sebanyak 4 orang.

3. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	2	50%
2.	31 – 40	1	25%
3.	41 – 50	1	25%
Jumlah		4	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 50%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 1 orang atau 25%,Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 41-50 orang yang di jadikan informan sebanyak 1 orang atau 25% sudah berumur 41-50 tahun.

B. Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis.

Setiap program/kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan atau dijalankan perlu dievaluasi agar dapat dinilai hasilnya. Menurut Nugroho (2004:183), evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejauhmana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Dalam hal keefektifan implementasi kebijakan terdapat lima tepat yang perlu dipenuhi, yaitu (Nugroho, 2014: 686-688):

- a. Tepat kebijakan, ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

- b. Tepat pelaksanaannya, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
- c. Tepat target, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
- d. Tepat lingkungan, lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.
- e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses. Yaitu *Policy Acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Strategic Readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

Untuk melihat Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis, maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Tepat kebijakan

ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan. disini kita dapat melihat seperti maksud dari tepat kebijakan yang di lakukan oleh Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis, maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

- a. Kemampuan Program Pemberdayaan dalam mengatasi Permasalahan anak putus sekolah

Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti berkaitan dengan Kemampuan Program Pemberdayan dalam mengatasi Permasalahan anak putus Sekolah ini di artikan sebagai sejauh mana Program yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan Permasalahan anak Putus sekolah dengan memberikan Pemberdayaan , pemberdayaan yang diberikan di sesuaikan dengan keterampilan yang di ingin kan oleh Peserta Pemberdayaan yakni anak anak putus sekolah di lingkungan Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengklais hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“terkait dengan Kemampuan Program Pemberdayaan ini dalam mengatasi Permasalahan anak Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis ,bentuk dari pemberdayaan ini kami sesuaikan dengan minat dan hobi yang mereka

inginkan seperti kalo untuk anak laki laki salah satu keterampilan yang kami berikan seperti latihan menyetir, kemudian kami juga berikan pelatihan perbengkelan ini kami berikan sesuai minat yang mereka inginkan agar pemberdayaan kami jalani ini bisa berjalan dengan lancar kemudian untuk Perempuan kami berikan pelatihan menjahit dan masih banyak lain pelatihan yang kami berikan”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memberikan pemberdayaan kepada Anak putus Sekolah di kabupaten Bengkalis di sesuaikan dengan minat peserta pemberdayaan tersebut seperti untuk anak laki laki diberikan pelatihan nyetir, Perbengkelan dan untuk anak perempuan di berikan pelatihan menjahit dll. Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu anak putus sekolah yang mengikuti Prgoram Pemberdyaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“Benar Pak, kami yang mengikuti program Pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di berikan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan hobi kami pak, seperti saya minat di perbengkelan dan Dinas Sosial memfasiliasi kami di bagian itu pak, dan ada juga teman saya diberikan pelatihan menyetir pak.”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Anak putus sekolah yang mengikuti Program Pemberdayaan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendapatkan Pelatihan sesuai dengan minat dan hobi peserta Pemberdayaan, seperti dari wawancara diatas peserta mendapatkan pelatihan menyetir dan perbengkelan untuk peserta Laki laki dan Peserta Perempuan mendapatkan pelatihan salah satunya menjahit.

Dari Hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti , peneliti melihat bahwa benar pelatihan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis kepada Anak putus sekolah yang mengikuti Program Pemberdayaan ini di sesuaikan dengan dengan minat dan hobi peserta, hal ini dilakukan agar terwujudnya tujuan dari Program pemberdayan ini sendiri.

- b. Kesesuaian isi program pemberdayaan dalam menanggulangi permasalahan remaja putus sekolah

Sesuai dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti berkaitan dengan indikator Kesesuaian isi program pemberdayaan dalam menanggulangi permasalahan remaja putus sekolah ini ,di artikan sebagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Begkalis seperti apa dan apakah telah sesuai dengan tujuan dari pemberyaan tersebut, hal ini bisa kita lihat dari Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengklais hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“masih sama seperti halnya yang tadi untuk pemberdayaan kami berikan kepada Anak putus sekolah khususnya yang mengikuti program Pembedayaan ini kami sesuai kan dengan Hobi mereka dimana , hal ini bertujuan agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif kepada peserta pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial kabupaten Bengkalis ini selain itu kami juga berikan dukungan berupa fasilitas –fasilitas yang di butuhkan seperti peserta pelatihan menjahit kami siapkan fasilitas alat –alat menjahitnya.”

Dari Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Program Pemberdayan yang dilakukan oleh dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk

menanggulangi permasalahan remaja putus sekolah ini sudah berjalan dengan beberapa program yang diberikan serta didukungnya fasilitas penunjang kegiatan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu anak putus sekolah yang mengikuti Program Pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“iya pak untuk kami yang mengikuti program pemberdayaan ini kami juga didukung fasilitas fasilitas pendukung dalam kegiatan pemberdayaan ini ,ini sangat membantu kami, tanpa di dukung fasilitas pasti kegaitan ini akan terhambat”

Dari Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Peserta yang mengikuti Program Pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ini , selain mendapatkan pelatihan yang disesuaikan dengan minat juga didukung oleh fasilitas fasilitas pendukung seperti untuk kegaitan menjahit, peserta mendapatkan fasilitas mesin jahit dll.

Berdasarkan hasil Observasi Peneliti melihat bahwa dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan anak putus sokolah oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ini dalam pelaksanaannya Dinas Sosial memberikan dukungan berupa fasilitas fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Anak putus sekolah seperti untuk pelatihan menjahit didukung dengan alat alat menjahit dll.

2. Tepat pelaksanaanya,

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan

yang bersifat monopoli.terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis pada indikator tepat pelaksana memiliki dua sub indikator yaitu .Instansi pelaksana Program Pemberdayaan, Sumber daya manusia Pelaksana Program Pemberdayaan.

a. Instansi Pelaksana Program Pemberdayaan.

Pada indikator Instansi Pelaksana Program Pemberdayaan kita akan mengetahui siapa pelaksana Program Pemberdayaan Remaja putus sekolah dan bagaimana pelaksanaannya. , Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengkalis hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“terkait dengan pemberdayaan remaja putus sekolah di lingkungan kabupaten Bengkalis di lakukan oleh Dinas Sosial dengan berkerja sama dengan PSBR atau yang kita kenal sebagai Panti Sosial Bina Remaja yang berlokasi di Kota Pekanbaru, untuk pelaksanaannya kami telah memberikan beberapa pelatihan kepada peserta pemberdayaan seperti yang telah di jelaskan sebelumnya , namun saat ini dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hambatan seperti masih banyak anak anak putus sekolah di wilayah kabupaten bengkalis ini yang saya rasa tidak semuanya mau mengikuti program yang kami siapkan ,apapun itu alasan mereka disini peran kami selaku mewakili pemerintah kabupaten bengkalis melalui dinas Sosial, untuk memberikan pemahaman kepada mereka akan program yang sangat membantu mereka untuk mendapatkan pemberadayaan berupa peningkatan keterampilan”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa terkait dengan penanganan Remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis di lakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan bekerja sama dengan PSBR Kota Pekanbaru dan beberapa kegaitan telah dilaksanakan walaupun masih ada beberapa permasalahan seperti masih ada anak yang putus sekolah dan tidak mengikuti program yang telah di sediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ini, Hasil Wawancara

dengan Andri, salah satu anak putus sekolah yang mengikuti Program Pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“ iya pak, ada beberapa teman saya yang sama halnya seperti saya tidak sekolah lagi tapi mereka tidak mengikuti program pemberdayaan ini, mereka beralasan Prosedur dan persyaratan yang diterapkan dalam pendaftaran masih menyulitkan bagi mereka yang akan mengikuti kegiatan pemberdayaan, sehingga mereka malas untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program pembinaan oleh Dinas Sosial”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis itu masih terdapat beberapa hambatan seperti masih ada remaja putus sekolah yang tidak mengikuti program ini dikarenakan tidak mengetahui prosedur serta persyaratan dalam pendaftaran program ini .

Berdasarkan Hasil observasi peneliti di lapangan juga melihat remaja yang putus sekolah tidak mengikuti program yang di laksanakan oleh Dinas Sosial terkait dengan Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah dengan alasan yang di jelas di atas.

b. Sumber daya manusia pelaksana program pemberdayaan

Pada indikator Sumber daya manusia pelaksana Program Pemberdayaan remaja putus sekolah di kabupaten Bengkalis diartikan sebagai orang yang menjalankan dan ikut serta dalam pelaksana Program ini hal ini bisa kita lihat dari Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengklais hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“iya untuk saat ini sumber daya kami dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis ini kami rasa kurang, dengan banyaknya peserta yang saat ini mengikuti program ini kami memang membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih, ya dengan anggaran yang kami miliki kami hanya bisa didukung sumberdaya yang ada saat ini, namun untuk kedepannya kami pasti akan menambah tenaga pelaksana Program pemberdayaan ini, dengan meningkatnya tenaga pelaksana dalam program ini yang jelas kami bisa lebih banyak menampung serta membina remaja putus sekolah khususnya di lingkungan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis diatas kita dapat mengetahui terkait dengan Sumberdaya pelaksana Program Pemberdayaan remaja putus sekolah ini masih memerlukan dukungan lebih, karena jumlah remaja putus sekolah yang meningkat, Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu anak putus sekolah yang mengikuti Program Pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“kami sebagai peserta Pemberdayan tidak terlalu mengetahui hal yang seperti itu pak, tapi saya secara pribadi setuju dengan terus bertambahnya peserta pemberdayaan anak putus sekolah ini di Kabupaten Bengkalis memang jumlah tenaga pelaksanaanya juga harus di tambah agar program ini bisa berjalan dengan lancar dan baik jika tenaga pelaksanaanya mencukupi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bawah sumberdaya itu sangat penting dan harus di perhatikan dengan terus berambahnya jumlah peserta Pemberdayaan remaja putus sekolah di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ini makanya harus di dukung dengan Sumberdaya yang memadai.

3. Tegat target

yaitu apakah target program yang diintervensi melalui penerapan program tersebut sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau

bertentangan dengan intervensi program lain, dan apakah target program dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis pada indikator tepat target memiliki dua sub indikator yaitu, Kesesuaian sasaran program pemberdayaan dengan yang direncanakan dan Kesesuaian sasaran program pemberdayaan dengan program lain.

a. Kesesuaian sasaran program pemberdayaan dengan yang direncanakan

Pada indikator Kesesuaian sasaran program pemberdayaan dengan yang direncanakan ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran dari program yang di jalankan Oleh Dinas Sosial kabupaten Bengkalis apakah telah sesuai atau belum , Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengkalis hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Terkait dengan Sasaran dari Program ini ya udah sangat jelas ya, Kita fokuskan kepada Remaja Putus sekolah khususnya yang ada di Kabupaten bengkalis ini kita rangkul, kita beri pembinaan keterampilan berupa pelatihan pelatihan yang mereka minat, ini akan berguna buat mereka, ketika mereka selesai mengikuti program ini mereka memiliki bekal skill seperti perbengkelan, menjahit dan masih banyak lain, saya bisa katakan sasaran program ini jelas karna anggota pelaksana kita langsung terjun kelapangan dalam mendata remaja remaja yang putus sekolah dan ingin mengikuti program ini “

Dapat kita ketahui dari Hasil wawancara diatas terkait dengan Kesesuaian sasaran program pemberdayaan dengan yang direncanakan, pihak Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan terkait dengan sasaran udah sangat jelas yang menjadi sasaran mereka remaja putus sekolah yang ada di Kabupaten Bengkalis, dan dalam pendataannya pegawai pelaksana program ini langsung kelapangan

terkait dengan pendataannya , Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu anak putus sekolah yang mengikuti Prgram Pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“ iya pak , saya juga dulu didata langsung oleh pegutas Dinas sosial dan kemudian kami diberikan sosialisasi tentang program pemberdayaan ini, menurut cara yang seperti ini sangat bagus jika pegawai langsung kelapangan dalam mendata karna saya yakin tidak semua anak anak yang putus sekolah tau tentang program ini dan bagaimana cara mendaftarnya pak.”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa terkait dengan kesesuaian sasaran dalam pelaksanaa Program pemberdayaan remaja putus sekolah ini telah tepat yaitu petugas Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis langsung turun kelapangan terkait dengan pendataan remaja putus sekolah yang ada diKabupten Bengkalis.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan peneliti melihat bahwa untuk sasaran dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ini udah tepat yaitu remaja yang putus sekolah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.

b. Kesesuaian sasaran program pemberdayaan dengan program lain

Pada indikator Kesesuaian sasaran Program Pemberdayaan dengan Program lain ini di artikan sebagai sasaran dari Program pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten bengkalis dengan Program lainnya yang berhungan dengan Pemberdayaan juga seperti PSBR atau Panti Sosial Bina Remaja di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala

Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengkalis hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Untuk kesesuaian sasaran Program Pemberdayaan dengan Program lainnya maksudnya ini Sasaran dari program yang kami jalankan saat ini dengan program lainnya yang sama halnya berkaitan dengan pemberdayaan juga ya, disini Program yang kami jalankan saat ini , Dalam rangka melaksanakan pemberdayaan Remaja Putus Sekolah yang ada di Kabupaten Bengkalis, maka Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menjalin mitra kerja dengan beberapa pihak, antara lain yaitu Dinas Pendidikan dan pihak swasta/wirausaha setempat serta UPT Kementerian Sosial yakni Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru Panti Sosial Bina Remaja Pekanbaru merupakan salah satu mitra kerja yang cukup penting dalam menerapkan program pembinaan anak putus sekolah.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan Kesesuaian Sasaran Program Pemberdayaan dengan Program lainnya, untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis menjalin mitra kerja dengan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru yang memiliki Sasaran program yang sama yaitu Pembinaan anak putus sekolah. Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti dilapangan bahwa untuk Kesesuaian Sasaran Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis dengan Program lainnya ini yaitu Program yang di jalankan oleh Dinas sosial ini memiliki kerja sama dengan PSBR Pekanbaru yang mana disana juga memiliki Sasaran yang sama yaitu anak putus sekolah untuk di bina.

4. Tepat lingkungan,

lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi

kebijakan. .terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis pada indikator tepat pelaksana memiliki dua sub indikator yaitu Lingkungan internal (organisasi pelaksana program) Lingkungan eksternal (masyarakat/publik)

a. Lingkungan Internal (Organisasi Pelaksana Program)

lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Unsur-unsur dari lingkungan internal seperti pegawai dll, Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengkalis hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah oleh Dinas Sosial kabupaten Bengkalis ini kami mengacu pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 dalam pelaksanaannya lingkungan internal kami sudah di persiapkan sebaik mungkin baik sumberdaya, sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis, karna kita lingkungan internal tidak baik maka program tidak akan dapat berjalan dengan lancar, dan juga sebaliknya”

Dari Hasil wawancara diatas kita ketahui untuk lingkungan internal pelaksana Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis telah di persiapkan sebaik mungkin agar Program Pemberdayaan ini dapat berjalan dengan baik. , Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu anak putus sekolah yang mengikuti Prgram Pemberdyaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“ iya pak , untuk pelaksana program pemberdayaan ini saya akui baik, karena pelayan yang kami rasakan saat ini sudah cukup memuaskan , baik dalam hal pendaftaran, dalam hal bimbingannya, untukn saat ini saya merasa cukup puas lah pak”

Dari hasil wawancara diatas untuk peserta Program pemberdayaan ini sudah merasa cukup puas seperti dalam hal pelayanannya, ini dapat kita artikan bahwa lingkungan internal pelaksana Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis sudah cukup Baik.

b. Lingkungan eksternal (masyarakat/publik).

Lingkungan eksternal adalah semua elemen di luar organisasi yang relevan , di dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Remaja Putus sekolah di Kabupaten Bengkalis ini lingkungan Eksternal diartikan sebagai pihak yang ikut atau berhubungan dengan program pemberdayaan ini Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengklais hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“lingkungan eksternal itu ya seperti salah satunya mitra yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis seperti PSBR kemudian yaa masyarakat dan selain lingkungan internal , lingkungan eksternal juga harus sangat di perhatikan guna memperlancar dan memsukkseskan Program Pemberdayaan ini”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas terkait dengan lingkungan Eksternal dalam pelaksanaan Pemberdayaan remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis ini seperti masyarakat dan juga mitra kerja seperti PSBR.

5. Tepat proses,

yaitu publik memahami dan menerima program sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan, dan publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari menerima. terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis pada indikator tepat pelaksana memiliki dua sub indikator yaitu Pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan ,Penerimaan masyarakat terhadap program pemberdayaan.

a. Pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan.

Pada indikator Pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan di artikan sebagai pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bengkalis tentang Program yang di jalankan yaitu Program Pemberdayaan Remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis , Pemahaman ini sangat penting karena tanpa pemahaman awal tentang program yang akan di jalankan maka program ini tidak akan berjalan dengan lancar Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengkalis hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Terkait dengan Pemahaman masyarakat terhadap program yang di jalankan ini kami selaku pelaksana Program ini telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten bengkalis, ini bertujuan agar masyarakat mengetahui program ini serta tujuan dari program Pemberdayaan ini, namun untuk sosialisasi kami akui belum semuanya kami berikan karna ya, Kabupaten bengkalis ini cukup luas akan

membutuhkan anggaran yang cukup besar agar masyarakat secara menyeluruh dapat kami berikan informasi tersebut.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas terkait dengan Pemahaman masyarakat terhadap Program Pemberdayaan, ini pemahaman masyarakat diberikan melalui wawancara namun belum secara menyeluruh dikarenakan faktor anggaran yang terbatas, , Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu anak putus sekolah yang mengikuti Prgoram Pemberdyaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“iya pak untuk sosialisasi memang pernah berikan oleh Dinas Sosial terkait dengan Program yang akan di jalankan yaitu program Pemberdayaan remaja putus Sekolah, ini berguna tanpa di sosialisasi kan terlebih dahulu kami sebagai masyarakat pasti tidak akan mengetahui akan program ini dan apa tujuan program ini, namun ada juga beberapa teman saya yang masih belum mengetahui program ini karena tidak mendapatkan sosialisasikan, saya berharap Dinas Sosial bisa berikan sosialisasi ini secara menyeluruh karna program ini sangat berguna untuk remaja yang putus sekolah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap program Pemberdayaan ini diberikan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis namun masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui akan program ini.

Berdasarkan Hasil Obervasi Peneliti di lapangan terkait dengan Pemenahan masyarakat terhadap program pemberdayaan ini masih ada masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi , dan hal ini harus menjadi perhatian oleh pelaksana program untuk lebih bisa memberikan sosialisasi secara merata agar

hasil dan tujuan dari Program Pemberdayaan Remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis dapat berjalan dengan baik dan lancar.

b. Penerimaan masyarakat terhadap program pemberdayaan

Terkait dengan indikator Penerimaan masyarakat terhadap program pemberdayaan ini dimaksud sebagai respon masyarakat terhadap program ini , . Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengkalis hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“untuk respon masyarakat saya rasa sangat baik ya, mereka cukup antusias dengan program Pemberdayaan ini karna ini sangat berguna bagi remaja yang putus sekolah untuk lebih mengembangkan potensi yang di milikinya, ya walaupun sekiranya masih ada remaja putus sekolah yang tidak mendaftar diri untuk mengikuti program ini dengan beberapa alasan, namun kami selaku pelaksana akan terus berikan pemahaman agar masyarakat khususnya remaja putus sekolah yang belumbergabung mengikuti program ini akan mendaftarkan diri.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui untuk respon masyarakat itu sendiri cukup antusias menanggapi program pemberdayaan ini , karena ini sangat berguna bagi mereka yang ingin nemanbah keterampilan atau skil khususnya untuk remaja putus sekolah di lingkungan Kabupaten Bengkalis Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu anak putus sekolah yang mengikuti Prgoram Pemberdyaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“kami sangat senang mendengar adanya program Pemberdayaan ini pak, ini sangat berguna untuk kami yang putus sekolah mau mengembangkan skil di berbagai bidang yang kami minati seperti perbengkelan dll, saya

juga berharap anak-anak yang putus sekolah di luar sana bisa ikut bergabung dalam Program pemberdayaan ini “

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa respon masyarakat sangat positif dalam menanggapi Program Pemberdayaan ini, Berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan juga melihat respon positif dan menerima program pemberdayaan ini. Berdasarkan Hasil Penelitian diatas Peneliti menyimpulkan bahwa tentang Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis, dalam pelaksanaannya Program ini sudah berjalan dengan melakukan beberapa kegiatan pembinaan yang disesuaikan dengan minat dan bakat Peserta Pemberdayaan seperti untuk laki-laki diberikan keterampilan Perbengkelan dan menyetir dan untuk anak perempuan diberikan salah satunya seperti pelatihan menjahit, namun dalam Program pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis masih terdapat beberapa kekurangan seperti proses sosialisasi yang diberikan belum terlaksana secara menyeluruh dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki dalam pelaksanaan program pemberdayaan remaja putus sekolah, kemudian kurangnya kesiapan instansi dalam menjalankan program pemberdayaan remaja putus sekolah, sehingga jumlah remaja putus sekolah yang dapat dibina atau diberdayakan antara lain seperti melalui kegiatan pelatihan keterampilan, masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah Remaja Putus Sekolah.

C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis.

Dalam Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis menemui hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain :

1. Dengan Luasnya Daerah yang ada di Kabupaten Bengkalis Serta terbatas anggaran yang di miliki dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis ini sehingga menyebabkan tidak meratanya sosialisasi yang di berikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sehingga masih ada beberapa daerah yang ada di Kabupaten Bengkalis ini tidak mengetahui program ini. Ini juga yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mengerti akan pentingnya program Pemberdayaan Remaja Putus sekolah ini.
2. Terkait dengan Sumberdaya dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah ini, dinilai masih kurang karena dalam pelaksanaannya jumlah tenaga pelaksana pembinaan tidak seimbang dengan jumlah peserta pembinaan yang terus meningkat.
3. Masih berkaitan dengan kurangnya sosialisasi sehingga masih ada juga masyarakat yang tidak mendaftarkan diri untuk mengikuti program pemberdayaan ini karena mereka menilai proses pendaftaran yang rumit dan mereka cukup kesulitan bagi remaja putus sekolah yang ingin mengikuti program ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori dalam penelitian ini, yakni teori pembinaan dapat disimpulkan :

1. Pada Indikator Tepat Program, dapat kita ketahui bahwa Tepat Program ini dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Remaja putus sekolah , pemberdayaan di lakukan berdasarkan minat dan hobi dari peserta program .
2. Pada Indikator Tepat Pelaksanaan, dapat kita ketahui bahwa pada indikator ini berkaitan dengan instansi pelaksana Program Pemberdayaan ini di laksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan memiliki mitra kerja yaitu PSBR Pekanbaru, dan juga berkaitan dengan masih kurangnya Sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksana Program ini.
3. Pada Indikator Tepat Target, dapat kita ketahui bawah tepat target ini berkaitan dengan sasaran dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan, dan yang menjadi sasarannya itu remaja putus sekolah yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkalis.
4. Pada Indikator Tepat Lingkungan, ini berkaitan dengan Lingkungan Internal dan external dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan remaja putus sekolah di kabupaten Bengkalis, lingkungan internal diartikan sebagai Pihak yang berkepentingan yaitu organisasi itu sendiri. Unsur-unsur dari lingkungan internal seperti pegawai, dan lingkungan external itu seperti masyarakat.

5. Pada indikator Tepat Proses, pada indikator ini dapat kita ketahui bahwa Pemahaman masyarakat terhadap program Pemberdayaan ini belum sepenuhnya mengerti, dikarenakan sosialisasi yang kurang maksimal di berikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan mengenai Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis, yaitu :

1. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis selaku Pelaksana Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis disarankan agar lebih memaksimalkan Sosialisasi yang diberikan dan harus merata kedaerah daerah yang ada di Kabupaten Bengkalis ini karena tanpa adanya sosialisasi maka partisipasi masyarakat akan menurun.
2. Disarankan Kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk memperhatikan sumberdaya dalam pelaksana Program Pemberdayaan ini karena ketika peserta program terus meningkat maka tenaga pelaksana juga harus di tambah agar Program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuannya.
3. Disarankan Kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan ini agar pegawai pelaksana untuk turun kelapangan membantu masyarakat yang kurang mengetahui alur pendaftaran pogram ini, karena masih ada masyarakat yang kesulitan dalam mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Teks:

- Adisasmita, Raharjo, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Abdul Aziz Humaizi. 2013. Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. *Dinas Kominfo pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara (USU)*, Medan. 3(1):3.
- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. dan Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn N. Wiliam, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Moleong, J, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. Hadari, 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan ke-11, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant, 2014. *Public Policy*. Edisi Revisi, Jakarta: PT. Media Komputindo.
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama.

Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Citra Utama.

Suryabrata, Sumadi, 2004. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wasistiono, Sadu, 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press Jatinangor.

Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru.

Jurnal/Skripsi:

Umayah, Siti, 2013. “*Peranan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Melalui Keterampilan.*” Skripsi Program S.1 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Widodo, Suryo, 2017. “*Strategi Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta Timur Melalui Keterampilan Elektro dan Montir Motor.*” Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dokumentasi dan Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.